

BUNGA RAMPAI AKUNTANSI PUBLIK : ISU KONTEMPORER AKUNTANSI PUBLIK

Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., Cert.IPSAS., CSRS., CMA

Dr. Ana Sopanah, SE., M.Si., Ak., CA., CMA

Dr. Rida Perwita Sari, SE., M.Aks., Ak., CA., CPA



BUNGA RAMPAI AKUNTANSI PUBLIK : ISU KONTEMPORER AKUNTANSI PUBLIK

Author

Abdul Halim , Setiyono Miharjo, Evi Maria, Abdul Halim, Heru Fahlevi, Syukriy Abdullah, Afrah Junita, IcuK Rangga Bawono, Henny Purnamasari, Harnovinsah, Ana Sopanah, Lilik Purwanti, Baihaqi, Armelly, Nila Aprila, Rini Indriani, Emilda Sulastri, Nurhidayah, Nur Azlina, Sem Paulus, Faiz Zamzami, Ihda Arifin Faiz, Irkham Huda, Yulistiana, Muhammad Hudaya, Wahyudin Nor, Dewi Lesmanawati, Marchelyn Pongsapan, Wuryan Andayani, Hestining Tyastuti, Indrawati Yuhertiana, Anita Primastiwi, Natalia Soka, Yovita Buraken, Rida Perwita Sari, Zulkifli Angga Laksmah, Annisa Isyaturrodhiah, Evada Dewata, Mochamad Hanif Rifqy

Layouter :

Dewi

Penyunting :

Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., Cert.IPSAS., CSRS., CMA

Dr. Ana Sopanah, SE., M.Si., Ak., CA., CMA

Dr. Rida Perwita Sari, SE., M.Aks., Ak., CA., CPA

Design Cover :

Azizur Rachman

copyright © 2020

Penerbit



Jl. Semolowaru No 84, Surabaya 60283 Jawa Timur, Indonesia

press@unitomo.ac.id

Telp: (031) 592 5970

Fax: (031) 593

ISBN : 978-623-93881-3-3

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

KATA SAMBUTAN

Bismillahi arrohmani arrohimi,

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh..

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, para akuntan pendidik di seluruh Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAIKAPd) bertujuan memajukan kualitas pendidikan akuntansi di Indonesia, melalui pengembangan dan peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Buku ini berhubungan dengan pengembangan penelitian dari para akuntan pendidik dari Forum Dosen Akuntansi Publik. Buku Bunga Rampai Akuntansi Publik merupakan kumpulan tulisan dari berbagai hasil penelitian akuntansi publik yaitu isu akuntansi pemerintah daerah, isu organisasi publik (nirlaba), dan isu akuntansi bumdes,

Saya selaku Ketua IAIKAPd mengucapkan ***'Selamat dan Sukses'*** kepada Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP) atas diterbitkannya **Buku "Isu Kontemporer Akuntansi Publik"**. *Semoga buku ini dapat memberi manfaat dan dapat meningkatkan peran inklusif akuntan pendidik melalui penelitian akuntansi.*

Aamiin Ya Robbal 'alamin

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh..

Surabaya, Mei 2020

Ketua IAIKAPd,

Prof. Dr. Dian Agustia, SE.,MSi.Ak,CA

KATA PENGANTAR

Bismillahi arrohmani arrohimi, Assalamualikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga Buku Bunga Rampai Akuntansi Publik “Isu Kontemporer Akuntansi Publik” dapat terselesaikan dengan baik. Kami penyunting mewakili semua penulis mempersembahkan buku ini dengan tujuan untuk menyebarkan ilmu, informasi, gagasan, hasil riset akuntansi publik di seluruh penjuru tanah air.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai hasil riset dengan tiga isu akuntansi publik yaitu isu akuntansi pemerintah daerah, isu organisasi publik (nirlaba), dan isu akuntansi bumdes. Dari ketiga isu tersebut menjadi 21 sub judul yang menarik untuk dibaca. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menambah literatur bagi yang berminat mendalami dan meneliti ilmu akuntansi (sektor) publik. Sebuah peristiwa penting yang menjadi milestone perkembangan Akuntansi Publik terjadi di FEB UGM pada tanggal, 1 Desember 2018 yaitu perubahan nama dari Akuntansi Sektor Publik (ASP) menjadi Akuntansi Publik (AP) pada acara Workshop Akuntansi Publik “Posisi dan Teori Dasarnya” yang dihadiri oleh 200 peserta dari berbagai PTN/PTS se Indonesia.

Penyebutan kata “sektor” menempatkan akuntansi untuk organisasi nirlaba ini sebagai subordinat atau cabang dari akuntansi yang lebih besar, dalam hal ini adalah akuntansi untuk organisasi bisnis. Oleh karena itu penggunaan kata yang tepat adalah Akuntansi Publik (tanpa sector). Akuntansi Publik adalah akuntansi yang memiliki hulu sendiri yang terpisah dari hulu Akuntansi Bisnis. Beberapa argument yang mendukung diantaranya: adanya perbedaan latar belakang pembentukan organisasi, tujuan pendirian organisasi dan cara pencapaian tujuan organisasi, serta sumber dan sifat pendanaan organisasi. Perbedaan-perbedaan ini memberikan konsekuensi perbedaan yang signifikan di antara kedua dunia akuntansi tersebut pada aspek perencanaan dan penganggaran, sistem pelaporan keuangan (akuntansi keuangan), maupun akuntansi manajemen.

Dengan di terbitkannya buku ini, kami penyunting mengucapkan banyak terima-kasih kepada semua penulis yang telah berkontribusi dalam buku ini dan juga penerbit yang telah membantu proses penerbitan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi

pembelajaran, pengembangan, pemahaman, dan menjadi inspirasi untuk terbitnya buku-buku berikutnya.

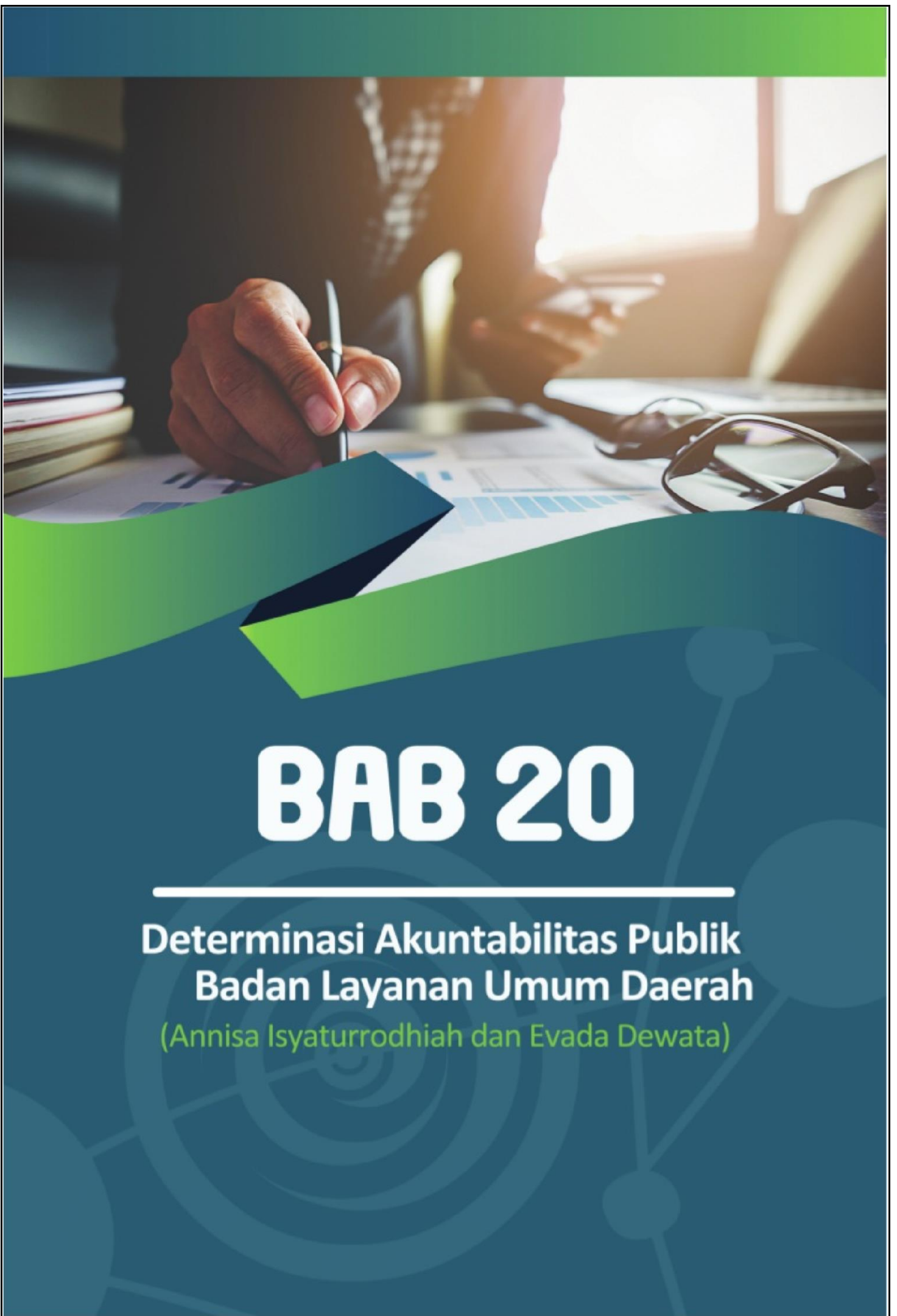
Segala kekurangan atas buku ini, menjadi tanggung jawab penyunting. Oleh karena itu kami menerima saran dan kritik dengan senang hati. Insyallah buku ini akan mendatangkan pahala dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Malang, Akhir Mei 2020.

Harnovinsah, Ana Sopanah, dan Rida Perwita Sari

BAB XI	:	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Nurhidayah, Nur Azlina, Sem Paulus)	165
BAB XII	:	Pengembangan Aplikasi Pelaporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Android (Faiz Zamzami, Ihda Arifin Faiz, Irkham Huda)	183
BAB XIII	:	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa (Baihaqi).....	199
BAB XIV	:	Multi Layer Pengawasan Dana Desa (Yulistiana, Muhammad Hudaya, Wahyudin Nor dan Dewi Lesmanawati)	219
BAB XV	:	Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Marchelyn Pongsapan dan Wuryan Andayani).....	235
BAB XVI	:	Tinjauan Akuntabilitas Publik Pesantren dalam Al Quran (Ihda Arifin Faiz).....	251
BAB XVII	:	Manajemen Piutang Di Rumah Sakit : Studi Kasus Di Sebuah Rumah Sakit Swasta Di Surabaya (Hestining Tyastuti dan Indrawati Yuhertiana)	271
BAB XVIII	:	Akuntansi Gereja Di Lingkungan Keuskupan Agung Semarang (Anita Primastiwi, Natalia Soka, Yovita Buraken)	287
BAB XIX	:	Sistem Informasi Desa Sebagai Wujud Akuntabilitas di Kabupaten Sidoarjo (Rida Perwita Sari, Zulkifli Angga Laksmana)	299
BAB XX	:	Determinasi Akuntabilitas Publik Badan Layanan Umum Daerah (Annisa Isyaturrodhiah dan Evada Dewata)	319
BAB XXI	:	Internal Audit di Organisasi Publik (Rida Perwita Sari dan Mochamad Hanif Rifqy)	337



BAB 20

Determinasi Akuntabilitas Publik Badan Layanan Umum Daerah

(Annisa Isyaturrodhiah dan Evada Dewata)

BAB XX
DETERMINASI AKUNTABILITAS PUBLIK BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH
(Studi Kasus pada RSUP Mohammad Hoesin Kota Palembang)

Annisa Isyaturrodhiah¹, Evada Dewata^{2*}
Politeknik Negeri Sriwijaya, evada78@polsri.ac.id

PENDAHULUAN

Badan Layanan Umum (BLU) sebagai penyelenggara pelayanan publik berperan penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa (Juliani, 2018). Dalam rangka memajukan pelayanan umum sebagai bentuk kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagaimana yang telah di amanatkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, selanjutnya pada pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Rumah Sakit yang didirikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan BLU (BLU) atau BLU Daerah (BLUD) hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pelayanan publik yang diberikan Rumah Sakit sebagai BLU/BLUD akan semakin baik apabila dikelola secara bisnis yang menekankan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang mendukung pelayanan.

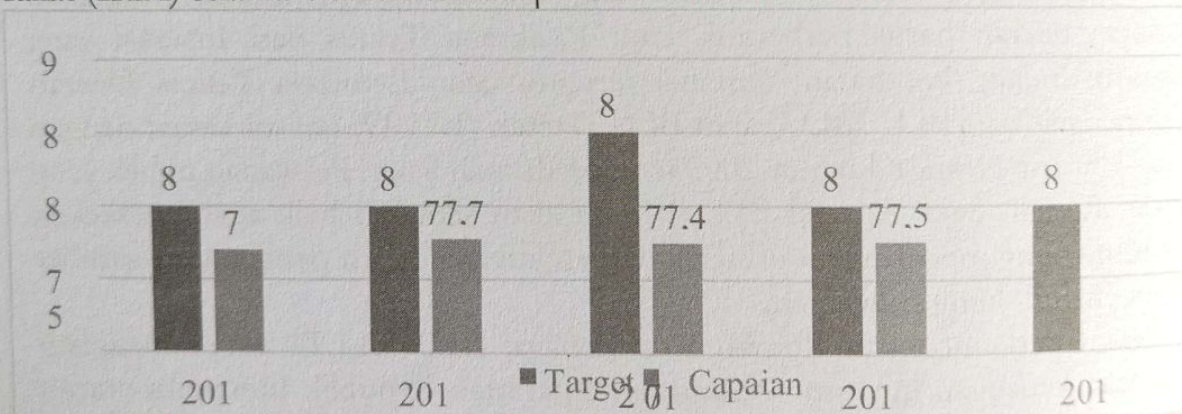
Dalam perkembangan Rumah Sakit sebagai BLU/BLUD untuk mengatur pengelolaan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Pengelolaan Keuangan menurut Halim (2007:330) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran sebagai media akuntabilitas, adanya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam bentuk anggaran maka diharapkan bisa lebih akuntabel sehingga mendapat dukungan public, seperti diungkap Mahsun (2016:101) dengan adanya *fiscal stress* dapat menimbulkan kebutuhan terhadap

akuntabilitas yang semakin meningkat pada pemerintah daerah. Untuk itu perlu penerapan anggaran berbasis kinerja karena memberikan pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas publik (S.Safaruddin, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLU telah memberikan fleksibilitas yaitu keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Mahmudi (2015:9) dan Bastian (2010:385) akuntabilitas publik menunjukkan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Rumah sakit dikelola dengan sistem akuntabilitas publik sebagai alat monitoring dan evaluasi rumah sakit. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Mohammad Hoesin adalah salah satu BLUD yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Banyaknya rujukan dan layanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat pada RSUP Mohammad Hoesin maka kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan menjadi hal yang penting dalam untuk menilai kualitas pelayanan BLU. Berikut disajikan grafik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama 4 tahun terhadap RSUP Mohammad Husein.



Sumber : Laporan Kinerja RSUP Mohammad Husein 2014-2018

Gambar 1 IKM terhadap pelayanan RSUP Mohammad Hoesin 2015-2018

Berdasarkan grafik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Gambar 1) dapat dilihat bahwa adanya penurunan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit, angka IKM berfluktuatif dan tidak mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahunnya. Pada 2015 dari target indeks kepuasan yang ditetapkan 80% hanya tercapai 77% dengan persentase capaian 96,25%. Pada tahun 2016 capaian indikator IKM 77,74% atau sebesar 96,83% dari target 80%. Tahun 2017 capaian IKM RSUP Mohammad Husein hanya tercapai 77,47% atau sebesar 91,14% dari target 81%. Lalu pada tahun 2018 IKM yang tercapai adalah 77,54% dari 80% target yang ditetapkan atau hanya sebesar 96,92%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan target 80% yang mana persentase ini lebih kecil dari tahun 2017 yaitu 85% RSUP Mohammad Hosein masih belum mencapai target pada penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Untuk memenuhi persyaratan administratif badan layanan umum, rumah sakit wajib menyusun Standar pelayanan Minimal (Ridwan,

2017) dan dalam Kepmenkes no 129 tahun 2008 dijelaskan bahwa SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Publik.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas publik khususnya terkait pengelolaan keuangan RSUP yang dalam pelaksanaannya tentu masih terdapat kendala-kendala yang harus diperbaiki, penerapan anggaran berbasis kinerja dan SPM dan dapat dirumuskan masalah bagaimana Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Anggaran Berbasis Kinerja, Standar Pelayanan Minimal terhadap Akuntabilitas Publik pada RSUP Mohammad Hoesin?. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat Bagi RSUP Mohammad Hoesin, sebagai masukan dan informasi tentang penerapan dan pengambilan kebijakan dalam Pengelolaan Keuangan, Anggaran Berbasis Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal untuk meningkatkan Akuntabilitas Publik Rumah Sakit sebagai BLUD.

TINJAUAN TEORITIS

Pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik RSUP Mohammad Hoesin

Pengelolaan Keuangan pada BLU memiliki beberapa tahapan yaitu dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dengan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengelolaan Keuangan berkaitan erat dengan pengelolaan APBN/D yang di dapat suatu instansi. Akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai kedaulatan yang tinggi dalam pelayanan publik. Pengelolaan Keuangan BLU memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan dalam menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien dan produktif (Julia & Sianturi, 2016) dan diharapkan dengan pengelolaan yang baik dan sesuai standar maka akuntabilitas publik dapat tercapai, sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H₁: Pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik RSUP Mohammad Hoesin.

Pengaruh Anggaran berbasis kinerja terhadap Akuntabilitas Publik RSUP Mohammad Hoesin

Menurut (Endrayani, Adiputra, Ari, & Darmawan, 2014) anggaran berbasis kinerja merupakan suatu kegiatan menganggarkan yang dilakukan oleh organisasi yang lebih menekankan pada output. Penerapan anggaran berbasis kinerja bisa berhasil, jika tercapainya realisasi anggaran dan seluruh proses kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin maksimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja, maka akuntabilitas publik akan tercapai. Hasil penelitian (S.Safaruddin, 2017) tentang pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik pada instansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas publik BPKAD Kota Kendari. Sejalan seperti diungkap

(Wahdatul et al., 2016) bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Bandung. Menurut (Endrayani et al., 2014) menyatakan ketika penerapan anggaran berbasis kinerja dilakukan semakin baik, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Sesuai dengan teori dan hasil penelitian terdahulu sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H₂ : Anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik RSUP Mohammad Hoesin Kota Palembang.

Pengaruh Standar Pelayanan Minimal terhadap Akuntabilitas Publik RSUP Mohammad Hoesin

Rumah sakit dikelola dengan sistem pertanggungjawaban dan akuntabilitas publik sebagai alat monitoring dan evaluasi rumah sakit. rumah sakit dituntut memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Ridwan, 2017). Sesuai dengan Kepmenkes No 129 tahun 2008 tentang SPM Rumah sakit menjelaskan bahwa SPM dapat menjadi alat untuk menunjukkan akuntabilitas publik. Sesuai dengan penjelasan dari teori diatas, penulis mengajukan hipotesis :

H₃ : Standar Pelayanan Minimal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik RSUP Mohammad Hoesin.

H₄ : Pengelolaan keuangan, anggaran berbasis kinerja, standar pelayanan minimal berpengaruh secara bersama-sama terhadap akuntabilitas publik RSUP Mohammad Hoesin

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian asosiatif kausal dengan metode kuantitatif untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang, Sumatera Selatan yaitu pada RSUP Mohammad Hoesin Kota Palembang. Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan April 2019 sampai dengan Juli 2019.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Publik BLU (Y) dan Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan (X₁), Anggaran berbasis Kinerja (X₂) dan Standar Pelayanan Minimal (X₃) seperti ditunjukkan dalam table 1 berikut ini.

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala	Nomor Pernyataan
Pengelolaan Keuangan (X1) adalah proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. (PP No 23 Tahun 2005)	1. Flexibilitas Pengelolaan Keuangan	Interval	1-2
	2. Penyajian dan pelaporan pengelolaan keuangan		3-4
	3. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan		4-5
	4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan		6-8
Anggaran Berbasis Kinerja (X2) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategik organisasi. Memiliki unsur yaitu pengukuran kinerja, Reward and punishment, kontrak kerja, kontrol eksternal dan internal dan pertanggungjawaban manajemen. (Sancoko, et. al, 2008)	1. Pengukuran Kinerja	Interval	1-5
	2. <i>Reward and Punishment</i>		6-8
	3. Kontrak Kerja		9-10
	4. Kontrol Eksternal dan Internal		11-13
	5. Pertanggungjawaban Manajemen		14-15
Standar Pelayanan Minimal (X3) kebijakan terkait penerapan SPM yaitu SPM diartikan sebagai ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar dimana kegiatan pembinaan dan pengawasan SPM dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang. (Kepmenkes no 129 tahun 2008)	1. Pelayanan Berbasis Pelanggan	Interval	1-2
	2. Jaminan Mutu Pelayanan		3-7
	3. Dasar Penentuan Kebutuhan		8-12
	4. Evaluasi Pelayanan		13-15

Akuntabilitas Publik (Y) memiliki dimensi harus dilakukan oleh organisasi sektor publik yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan dan keuangan. Ellwood (1993) dalam (Hamidi Mohamad Fauji, 2014)	1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran	Interval	1-4
	2. Akuntabilitas Manajerial		5-7
	3. Akuntabilitas Program		9-11
	4. Akuntabilitas Kebijakan		12-15
	5. Akuntabilitas Keuangan		15-17

Sumber : Data yang diolah, 2019.

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel jenuh, dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel (Arikunto, 2008:116) yang dijabarkan dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Populasi Responden

No.	Nama Bagian / Bidang	Jumlah
1.	Bagian Perencanaan dan Anggaran	13
2.	Bagian Akuntansi	15
3.	Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi dana	12
4.	Bagian Fasilitas Pelayanan Medik	14
	Total Responden	54

Sumber: Data diolah, 2019

Jumlah pertanyaan yang digunakan untuk mengukur pengaruh Akuntabilitas Publik pada RSUP Mohammad Hoesin dalam penelitian ini adalah sebanyak 17 pertanyaan. Berdasarkan uji validitas yang dilakukan dari indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan, Akuntabilitas Keuangan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3

Uji Validitas Pernyataan-pernyataan pada kuesioner Variabel Akuntabilitas Publik

Pernyataan	r Tabel	r Hitung	Kesimpulan
Akuntabilitas Publik 1	0,244	0,383	Valid
Akuntabilitas Publik 2	0,244	0,469	Valid
Akuntabilitas Publik 3	0,244	0,453	Valid
Akuntabilitas Publik 4	0,244	0,473	Valid
Akuntabilitas Publik 5	0,244	0,456	Valid
Akuntabilitas Publik 6	0,244	0,651	Valid
Akuntabilitas Publik 7	0,244	0,400	Valid

Akuntabilitas Publik 8	0,244	0,301	Valid
Akuntabilitas Publik 9	0,244	0,605	Valid
Akuntabilitas Publik 10	0,244	0,430	Valid
Akuntabilitas Publik 11	0,244	0,541	Valid
Akuntabilitas Publik 12	0,244	0,430	Valid
Akuntabilitas Publik 13	0,244	0,542	Valid
Akuntabilitas Publik 14	0,244	0,707	Valid
Akuntabilitas Publik 15	0,244	0,583	Valid
Akuntabilitas Publik 16	0,244	0,476	Valid
Akuntabilitas Publik 17	0,244	0,226	Valid

Sumber: Data yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat r hitung lebih besar dari r tabel maka secara keseluruhan dinyatakan valid. Hal ini mengindikasikan pernyataan yang valid mampu untuk mengukur variabel Akuntabilitas Publik pada penelitian.

Jumlah pertanyaan yang digunakan untuk mengukur pengaruh Pengelolaan Keuangan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 pertanyaan. Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap pertanyaan kuesioner dari variabel Pengelolaan Keuangan dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Uji Validitas Pernyataan-pernyataan pada kuesioner Variabel Pengelolaan Keuangan

Pernyataan	r Tabel	r Hitung	Kesimpulan
Pengelolaan Keuangan 1	0,244	0,620	Valid
Pengelolaan Keuangan 2	0,244	0,692	Valid
Pengelolaan Keuangan 3	0,244	0,638	Valid
Pengelolaan Keuangan 4	0,244	0,660	Valid
Pengelolaan Keuangan 5	0,244	0,794	Valid
Pengelolaan Keuangan 6	0,244	0,623	Valid
Pengelolaan Keuangan 7	0,244	0,644	Valid
Pengelolaan Keuangan 8	0,244	0,594	Valid

Sumber: Data yang diolah SPSS Versi 23, 2019.

Berdasarkan tabel 4 peneliti menggunakan 8 butir pertanyaan untuk mengukur variabel Pengelolaan Keuangan, semua butir pertanyaan dinyatakan valid karena memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} .

Jumlah pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel Anggaran Berbasis Kinerja dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 pertanyaan seperti dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Uji Validitas Pernyataan-pernyataan pada kuesioner Variabel Anggaran Berbasis Kinerja

Pernyataan	r Tabel	r Hitung	Kesimpulan
Anggaran Berbasis Kinerja 1	0,244	0,632	Valid
Anggaran Berbasis Kinerja 2	0,244	0,701	Valid
Anggaran Berbasis Kinerja 3	0,244	0,710	Valid
Anggaran Berbasis Kinerja 4	0,244	0,636	Valid
Anggaran Berbasis Kinerja 5	0,244	0,643	Valid
Anggaran Berbasis Kinerja 6	0,244	0,342	Valid
Anggaran Berbasis Kinerja 7	0,244	0,509	Valid
Anggaran Berbasis Kinerja 8	0,244	0,692	Valid
Anggaran Berbasis Kinerja 9	0,244	0,600	Valid
Anggaran Berbasis Kinerja 10	0,244	0,786	Valid
Anggaran Berbasis Kinerja 11	0,244	0,746	Valid
Anggaran Berbasis Kinerja 12	0,244	0,573	Valid
Anggaran Berbasis Kinerja 13	0,244	0,685	Valid
Anggaran Berbasis Kinerja 14	0,244	0,645	Valid
Anggaran Berbasis Kinerja 15	0,244	0,528	Valid

Sumber: Data yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 5 peneliti menggunakan 15 butir pertanyaan untuk mengukur variabel Anggaran Berbasis Kinerja, semua butir pertanyaan dinyatakan valid karena memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} .

Jumlah pertanyaan yang digunakan untuk mengukur pengaruh Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 pertanyaan. Berdasarkan uji validitas Standar Pelayanan Minimal dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6
Uji Validitas Pernyataan-pernyataan pada kuesioner Variabel Standar Pelayanan Minimal

Pernyataan	r Tabel	r Hitung	Kesimpulan
Standar Pelayanan Minimal 1	0,244	0,547	Valid
Standar Pelayanan Minimal 2	0,244	0,640	Valid
Standar Pelayanan Minimal 3	0,244	0,629	Valid
Standar Pelayanan Minimal 4	0,244	0,679	Valid
Standar Pelayanan Minimal 5	0,244	0,610	Valid
Standar Pelayanan Minimal 6	0,244	0,640	Valid
Standar Pelayanan Minimal 7	0,244	0,583	Valid
Standar Pelayanan Minimal 8	0,244	0,571	Valid
Standar Pelayanan Minimal 9	0,244	0,629	Valid
Standar Pelayanan Minimal 10	0,244	0,679	Valid

Standar Pelayanan Minimal 11	0,244	0,718	Valid
Standar Pelayanan Minimal 12	0,244	0,651	Valid
Standar Pelayanan Minimal 13	0,244	0,651	Valid
Standar Pelayanan Minimal 14	0,244	0,714	Valid
Standar Pelayanan Minimal 15	0,244	0,679	Valid

Sumber: Data yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 6 peneliti menggunakan 15 butir pertanyaan untuk mengukur variabel Standar Pelayanan Minimum (SPM), semua butir pertanyaan dinyatakan valid karena memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} .

Suatu variabel dikatakan kurang baik jika memberikan nilai koefisien Alpha Cronbach $< 0,60$, sedangkan $0,7$ dapat diterima dan $> 0,8$ adalah baik (Priyatno, 2012:187).

Tabel 7 Hasil Uji Reliabilitas Akuntabilitas Publik BLU

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y)	0,856	Reliabel
Pengelolaan Keuangan BLU (X1)	0,886	Reliabel
Anggaran Berbasis Kinerja (X2)	0,920	Reliabel
Standar Pelayanan Minimal (X3)		

Sumber: Data yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa *Cronbach Alpha* $> 60\%$. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien reliabilitas atas pertanyaan-pertanyaan pada variabel terikat adalah reliabel. Artinya pertanyaan tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel terikat dengan tingkat konsistensi yang sangat baik.

Selanjutnya teknik analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan pengujian analisis regresi linier berganda yang merupakan teknik statistik untuk menguji pengaruh antara dua variabel baik secara simultan maupun parsial.

PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Bidang Perencanaan dan Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan dan Mobilisasi dana dan Bagian Fasilitas Pelayanan Medik. Jumlah responden sebanyak 54 orang. Data demografi menyajikan informasi umum mengenai kondisi responden yang dapat dianalisis secara kualitatif berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan status kepegawaian.

Tabel 8 Data Demografi Responden

No	Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Usia		
	a. < 25 Tahun		
	b. 24-40 Tahun	35	64,8%
	c. 41-55 Tahun	19	35,2%
	d. > 56 Tahun		
	Jumlah	54	100%
2.	Jenis Kelamin		
	a. Perempuan	25	47,3%
	b. Laki - Laki	29	53,7%
	Jumlah	54	100%
3.	Jabatan		
	a. Struktural	12	22,2%
	b. Fungsional	42	77,8%
	Jumlah		
4.	Pendidikan Terakhir		
	a. Diploma III (Ahli Madya)	2	3,71%
	b. Diploma IV (Sarjana Terapan)	1	1,85%
	c. Strata 1 (Sarjana)	40	74,07%
	d. Strata 2 (Magister)	11	20,37%
	Lainnya		
	Jumlah	54	100%
5.	Status Kepegawaian		
	a. PNS	45	83,30%
	b. Pegawai BLU	4	7,40%
	Tenaga Honor	6	9,30%
	Jumlah	54	100%

Sumber: Data yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa kuesioner yang disebar sebanyak 54 kuesioner dan yang mengembalikan kuesioner dan dapat diolah sebanyak 54 kuesioner (100%). Dari karakteristik sampel penelitian ini diharapkan dapat mengakomodir dan mewakili presentasi data dan kesimpulan penelitian ini.

Deskripsi data penelitian yaitu menunjukkan hasil yang diperoleh berdasarkan jawaban responden terhadap masing-masing indikator pengukur variabel. Skor masing-masing alternative jawaban dari variabel penelitian telah ditentukan dengan nilai minimal 1 dan maksimal 5, dengan interval.

Tabel 9 Frekuensi Variabel penelitian Akuntabilitas Publik (Y)

Variabel	Pertanyaan	Skor Rata-rata	Kreteria
Akuntabilitas Publik (Y)	Pertanyaan 1	4,42	Sangat Setuju
	Pertanyaan 2	4,01	Setuju
	Pertanyaan 3	4,33	Sangat Setuju
	Pertanyaan 4	4,29	Sangat Setuju
	Pertanyaan 5	4,35	Sangat Setuju
	Pertanyaan 6	4,18	Setuju
	Pertanyaan 7	4,37	Sangat Setuju
	Pertanyaan 8	4,12	Setuju
	Pertanyaan 9	4,25	Sangat Setuju
	Pertanyaan 10	4,12	Setuju
	Pertanyaan 11	4,31	Sangat Setuju
	Pertanyaan 12	4,11	Setuju
	Pertanyaan 13	4,24	Sangat Setuju
	Pertanyaan 14	4,35	Sangat Setuju
	Pertanyaan 15	4,07	Setuju
	Pertanyaan 16	4,29	Sangat Setuju
	Pertanyaan 17	4,18	Setuju
	Skor Rata-rata Y	4,24	Sangat Setuju

Sumber: Data yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa dari 54 sampel yang digunakan dalam penelitian ini, Akuntabilitas Publik merupakan variabel dependen (Y) mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,26 artinya pada kuesioner mengenai variabel Y dengan 17 pertanyaan akan menghasilkan nilai 4,24 yang mendekati angka 5 yang berarti rata-rata penilaian variabel Akuntabilitas Publik adalah sangat setuju.

Tabel 10 Frekuensi Variabel penelitian Pengelolaan Keuangan (X1)

Variabel	Pertanyaan	Skor Rata-rata	Kategori
Pengelolaan Keuangan (X1)	Pertanyaan 1	4,40	Sangat setuju
	Pertanyaan 2	4,37	Sangat setuju
	Pertanyaan 3	4,48	Sangat Setuju
	Pertanyaan 4	4,41	Sangat setuju
	Pertanyaan 5	4,31	Sangat setuju
	Pertanyaan 6	4,42	Sangat setuju
	Pertanyaan 7	4,37	Sangat setuju
	Pertanyaan 8	4,37	Sangat setuju
	Skor rata-rata	4,39	Sangat setuju

Sumber: Data yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa variabel Pengelolaan Keuangan (X_1) mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,39 artinya pada kuesioner mengenai variabel X_1 sebanyak 8 pertanyaan akan menghasilkan angka rata-rata sebesar 4,39 yang mendekati angka 5 yang berarti rata-rata respon responden terhadap Pengelolaan Keuangan adalah kategori sangat setuju.

Tabel 11 Frekuensi Variabel penelitian Anggaran Berbasis Kinerja (X_2)

Variabel	Pertanyaan	Skor Rata-rata	Kategori
Pengelolaan Keuangan (X_1)	Pertanyaan 1	4,27	Sangat setuju
	Pertanyaan 2	4,01	Setuju
	Pertanyaan 3	4,13	Setuju
	Pertanyaan 4	4,25	Sangat setuju
	Pertanyaan 5	4,25	Sangat setuju
	Pertanyaan 6	4,20	Sangat setuju
	Pertanyaan 7	4,25	Sangat setuju
	Pertanyaan 8	4,18	Setuju
	Pertanyaan 9	4,42	Sangat Setuju
	Pertanyaan 10	4,50	Sangat setuju
	Pertanyaan 11	4,40	Sangat setuju
	Pertanyaan 12	4,42	Setuju
	Pertanyaan 13	4,35	Setuju
	Pertanyaan 14	4,18	Setuju
	Pertanyaan 15	4,11	Setuju
	Skor rata-rata	4,26	Sangat setuju

Sumber: Data yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X_2) mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,26 artinya pada kuesioner mengenai variabel X_2 sebanyak 15 pertanyaan akan menghasilkan angka rata-rata sebesar 4,26 yang mendekati angka 5 yang berarti rata-rata respon responden terhadap Anggaran Berbasis Kinerja adalah kategori sangat setuju.

Tabel 12 Frekuensi Variabel penelitian Standar Pelayanan Minimal (X₃)

Variabel	Pertanyaan	Skor Rata-rata	Kategori
Standar Pelayanan Minimal (X ₃)	Pertanyaan 1	4,35	Sangat setuju
	Pertanyaan 2	4,03	Sangat setuju
	Pertanyaan 3	4,20	Setuju
	Pertanyaan 4	4,25	Sangat setuju
	Pertanyaan 5	4,29	Sangat setuju
	Pertanyaan 6	4,35	Sangat setuju
	Pertanyaan 7	4,07	Sangat setuju
	Pertanyaan 8	4,50	Sangat setuju
	Pertanyaan 9	4,46	Setuju
	Pertanyaan 10	4,24	Sangat setuju
	Pertanyaan 11	4,37	Sangat setuju
	Pertanyaan 12	4,40	Setuju
	Pertanyaan 13	4,33	Setuju
	Pertanyaan 14	4,22	Sangat setuju
	Pertanyaan 15	4,22	Setuju
	Skor rata-rata	4,28	Sangat setuju

Sumber: Data yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 12 dapat dilihat bahwa dari variabel Standar Pelayanan Minimal (X₂) mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,28 artinya pada kuesioner mengenai Standar Pelayanan Minimal yang terdiri 15 pertanyaan akan menghasilkan nilai rata-rata sebesar 4,28 artinya adalah masuk kategori setuju.

Tabel 13 memuat ringkasan hasil pengujian model penelitian yaitu nilai koefisien, nilai t-statistik, dan probabilitasnya untuk setiap variabel independen, nilai R square dan nilai F dan signifikansi.

Tabel 13 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.330	5.410		3.943	.000
	Pengelolaan Keuangan	0,548	0,201	0,359	2.720	.009
	Anggaran Berbasis Kinerja	0,451	0,126	0,486	3.580	.001
	Standar Pelayanan Minimal	0,041	0,156	0,043	0,265	.792
	R square	0.809				
	Adjusted R2	0.633				
	F	31.521				
	Sig	0.000				

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik

Sumber : Output SPSS, 2019.

Pada Tabel 13 menunjukkan hasil bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0,633. Hal ini berarti variasi skor Akuntabilitas Publik dapat dijelaskan oleh variabel Pengelolaan Keuangan, Anggaran Berbasis Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal sebesar 63,3%. Sedangkan sisanya sebesar 36,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Nilai F hitung sebesar 31,521 > dari F-tabel 2,790, hal ini berarti Pengelolaan Keuangan, Anggaran Berbasis Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Publik pada RSUP Mohammad Hoesin.

Berdasarkan tabel 13, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,720 > 2,008$) dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik BLU (Y). Berdasarkan signifikansi yang diperoleh sebesar $0,009 < 0,05$ maka **H1 diterima**, artinya pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik RSUP Mohammad Hoesin. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh kuat pada Pengelolaan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik. Berdasarkan nilai koefisien korelasi (r) diketahui positif 0,548, Tanda positif menunjukkan hubungan yang searah antara rasio desentralisasi fiskal (variabel independen) dengan skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten dan kota (variabel dependen). Hal ini berarti apabila semakin baik pengelolaan keuangan maka akan mendukung akuntabilitas publik pada RSUP Mohammad Hoesin. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Julia & Sianturi, 2016) bahwa pengelolaan keuangan BLU memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sudah dijalankan dan dipahami tidak saja oleh tim pengelola keuangan namun juga ke seluruh komponen pelaku manajemen RSUP, dan dalam menjalankan pengelolaan keuangan, BLUD telah diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga bisa memenuhi kebutuhan ekonomi BLUD sesuai dengan ketentuan yang ada keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dimana salah satu bentuknya yaitu dengan adanya penerapan *good governance* dengan perwujudan Akuntabilitas Publik.

Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X_2) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,580 > 2,008$) dapat disimpulkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik BLU (Y). Berdasarkan signifikansi yang diperoleh sebesar $0,792 < 0,05$ maka **H2 diterima**, artinya Anggaran Berbasis Kinerja memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Publik dan berdasarkan hasil dari koefisien regresi dengan arah positif maka pengaruh yang dihasilkan juga positif, hal ini berarti apabila semakin baik penerapan Anggaran Berbasis Kinerja akan semakin baik juga Akuntabilitas Publik pada RSUP Mohammad Hoesin.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (S.Safaruddin, 2017) bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah BPKAD Kota Kendari. Selanjutnya penerapan Anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLU yang menyatakan BLU dalam menyusun dokumen penganggarnya menggunakan Anggaran Berbasis Kinerja. Sejalan dengan pendapat (Nurhayati et al., 2016) bahwa akuntabilitas kinerja perlu didukung oleh penerapan penganggaran berbasis kinerja yang menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya dengan baik yang diharapkan oleh masyarakat dan menciptakan akuntabilitas yang baik terhadap masyarakat.

Hasil temuan menunjukkan RSUP Mohammad Hoesin telah menyusun perencanaan anggaran untuk menjamin kegiatan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Perencanaan anggaran RS secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum Anggaran sampai dengan disusunnya Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja RS. Penerapan Anggaran berbasis kinerja di RSUP Mohammad Hoesin telah dilaksanakan mulai dari pengukuran kinerja yang dilakukan di setiap unit kerja. Hal ini dilakukan sebagai pengontrol mutu untuk kemudian diverifikasi oleh instansi pusat serta lembaga audit dengan adanya pengukuran kinerja yang baik di setiap unit kerja dapat mengevaluasi dan meningkatkan kinerjanya.

Variabel Standar Pelayanan Minimal memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,265 < 2,008$) dapat disimpulkan bahwa Standar Pelayanan Minimal secara parsial tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik (Y). Berdasarkan signifikansi yang diperoleh sebesar $0,001 < 0,05$ maka **H3 ditolak**, artinya Standar Pelayanan Minimal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Publik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh kuat Standar Pelayanan Minimal terhadap Akuntabilitas Publik. Hasil penelitian ini menunjukkan belum optimal SPM yang diterapkan oleh RSUP Mohammad Hoesin, terlihat dari data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang setiap tahunnya tidak mencapai target, hal ini bisa saja dikarenakan misalnya koordinasi pegawai yang masih kurang dan sumber daya manusia yang belum memahami aturan dalam pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Lestari (2018) bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Publik serta menurut (Kun-tjoro and Djasri, 2007) Rumah sakit dituntut untuk dapat menunjukkan akuntabilitas dengan senantiasa memenuhi standar

pelayanan minimal (SPM).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan BLU yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Dalam hal pengelolaan keuangan proses Penyusunan dokumen penganggaran, (RBA) pada BLU harus berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja. Tujuan penyusunan anggaran adalah untuk mendukung terselenggaranya program/kegiatan sebagai suatu acuan dalam penggunaan anggaran pada pelaksanaannya. Dengan demikian penerapan anggaran berbasis kinerja akan sejalan dengan kegiatan penyediaan pelayanan dasar yang optimal.

Berdasarkan output hasil uji signifikansi F menunjukkan nilai F sebesar 31,521 dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal tersebut mengindikasikan bahwa F-hitung sebesar $31,521 >$ dari F-tabel 2,790. Sehingga H_0 ditolak atau H_4 diterima artinya Pengelolaan Keuangan, Anggaran Berbasis Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai pengujian dan analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial, variabel Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Publik RSUP Mohammad Hoesin, namun variabel Standar Pelayanan Minimal tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Publik RSUP Mohammad Hoesin
2. Secara bersama-sama (simultan) Pengelolaan Keuangan, Anggaran Berbasis Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal ber-pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Publik RSUP Mohammad Hoesin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anies Iqbal Mustofa. (2012). Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang, *Accounting Analysis Journal*, 1(1).
- Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga :Jakarta
- Endrayani, K. S., Adiputra, I. M. P., Ari, N., & Darmawan, S. (2014). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Kehutanan Upt Kph Bali Tengah Kota Singaraja). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1).
- Hamidi Mohammad Fauji. (2014). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas, 12(1), 39–62.

- Julia, T., & Sianturi, A. M. T. (2016). Pengaruh Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Pk-Blu) Terhadap Kinerja Finansial, Kinerja Non Finansial Dan Mutu Layanan Pendidikan (Studi Kasus Pada: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa), 3(1), 1–17.
- Juliani, H. (2018). Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik, 1, 47–61.
- Kuntjoro, T., And Djastri, H. (2007). Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Sebagai Persyaratan Badan Layanan Umum Dan Sarana Peningkatan Kinerja,. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 10(1), 3-10.
- Menkes Ri. (2008). Keputusan Menteri Kesehatan Ri Nomor 129/Menkes/Sk/Ii/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
- Mahmudi (2015), Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Nurhayati, R. D., Irmadariyani, R., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Unej, U. J., & Kalimantan, J. (2016). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Banyuwangi Effect Of Performance Based Budgeting Performance Accountability Regional Water (Pdam) District Banyuwangi.
- Priyatno, Duwi. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan Spss 20*. Yogyakarta : Andi.
- Ridwan, B. (2017). Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal. *E Jurnal Katalogis*, 5(12), 108–117.
- Sancoko, Bambang, Et Al. (2008). Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Di Indonesia. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- S. Safaruddin, S. B. (2017). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 93–105.
- T. Wahdatul, L., Rahayu, S., Dillak, V. J., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Telkom, U. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung The Influence Of Performance–Based Budgeting And Financial Reporting System To The Accountability Of The Local Government ' S Performance On Bandung Regency, 3(2), 1560–1565.